

**PENGUASA DAN KEKUASAAN
DALAM PANDANGAN KOMUNIKASI POLITIK MACHIAVELLI**

Mukhtar

ABSTRACT

The political thinking of Machiavelli's power is how this power is achieved and maintained. The source of power for Machiavelli is the state, therefore the state in his view has the sovereignty and the highest position of Power by Machiavelli relying on human experience. According to Machiavelli, Power has autonomy apart from moral values. Because according to him, power is not a tool to serve the virtues, justice and freedom of god, but power as a tool to serve the interests of the state.

Machiavelli understood the power of having the purpose of saving the life of the state and defending its independence. Machiavelli asserted, to maintain power, a ruler is allowed to lie, cheat and oppress. This view is not as political advice, but Machiavelli views power is not pure heavenly world. as was the situation in medieval times and pre-Renaissance. In his view, power is a world full of intrigue, abomination and folly.

The implementing power justifies any means to achieve its goals. Rulers are entitled to violate the rights of their people when it is perceived as obstructing the purposes and ideals of the ruler. Machiavelli argues that civilized humans will almost certainly balance out the unscrupulous egocentricity. If one wants to establish a Republican state, Machiavelli discloses, he will find it easier to achieve, compared to someone from a big city, because of whose condition has been damaged. If an egoist is immoral, he or she will be wise in acting and keep adjusting to the conditions at hand.

Keyword: *Prudence, powers and Politics*

ABSTRACT

Pemikiran politik kekuasaan Machiavelli adalah bagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Kekuasaan menurut Machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Menurut Machiavelli, Kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara.

Machiavelli memahami kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan. Machiavelli menegaskan, untuk mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa diperbolehkan berbohong, menipu dan menindas. Pandangan ini bukan sebagai

nasehat politik, melainkan machiavelli memandang kekuasaan memang tak semurni dunia surgawi. sebagaimana situasi pada zaman pertengahan dan pra *renaissance*. Dalam pandangannya, kekuasaan adalah dunia yang penuh intrik, kekejian dan ketololan.

Kekuasaan yang menerapkan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Penguasa berhak melanggar hak-hak rakyatnya bilamana dianggap menghalangi tujuan dan cita-cita penguasa. Machiavilli berpendapat bahwa manusia beradab hampir pasti akan menyeimbangi egositas yang tidak bermoral. Jika seseorang menginginkan untuk mendirikan Negara Republik, Machiavilli mengungkapkan, ia akan merasa lebih mudah untuk meraihnya, dibandingkan dengan seseorang dari kota besar, karena yang kondisinya sudah rusak. Jika seorang egois yang tidak bermoral, dia akan bijak dalam bertindak serta tetap menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Kata kunci: Prience, kekuasaan dan Politik

A. Pendahuluan

Penguasa, kekuasaan dan negara merupakan satu kesatuan yang mengikat, dan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan tidak mungkin terwujud jika negara tidak ada, dan begitu juga sebaliknya, sebuah negara tidak akan sempurna tanpa adanya kekuasaan. Dikarenakan kekuasaan dan negara merupakan satu elemen yang saling mempengaruhi.

Selama masa hidup Machiavelli pada saat puncak-puncaknya Renaissance Italia, Italia terbagi-bagi dalam negara-negara kecil, berbeda dengan negeri yang bersatu seperti Perancis, Spanyol atau Inggris. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa dalam masanya Italia lemah secara militer padahal brilian di segi kultur.

Machiavelli dikenal sebagai pemikir politik yang paling berpengaruh dalam pemikiran politik dunia, pemikirannya dikenang hingga saat ini. Hanya ini tak lepas dari dua karya monumentalnya, *Il principe* (Sang Penguasa) dan *Discorse* (percakapan). Dua buku yang diselesaikannya dalam jeda waktu lima tahun, membawa namanya kedalam sebuah polemik yang dalam. Selama beberapa abad, kutukan dan makian terhadapnya terus menggema. Baru pada abad ke sembilan belas upaya untuk mengangkat pemikiran dan harapan Machiavelli sesungguhnya mulai dilakukan.

Terjadi banyak perbedaan pendapat tentang konsep kekuasaan yang dipersepsikan oleh setiap tokoh politik. Perbedaan itu muncul dari setiap zaman yang berbeda, tentu berbeda pula pemahaman konsep yang dikemukakan. Perbedaan pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi. Salah satu tokoh politik yang memberikan pemahaman konsep kekuasaan itu adalah Niccolo Machiavelli. Machiavelli merupakan salah seorang tokoh klasik, yang begitu berani menegaskan tentang konsep-konsep kekuasaan yang harus dimiliki oleh seorang penguasa, walaupun dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan itu harus menghalalkan segala macam cara. Machiavelli secara populer dianggap sebagai pengatur siasat yang jahat, dan berliku-liku, ia menulis karyanya *The prince*, untuk menjilat keluarga Medici, penguasa florentina yang kuat, yang berperan menjatuhkannya.

B. Metodologi Penelitian

Karena persoalan yang penulis angkat berhubung dengan konsep pemikiran tokoh. Maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian diskriptif dan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis – kritis – sosio – historis. Melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian dikategorikan pada penelitian studi konsep dan tergolong dalam jenis penelitian *Library Reasearch* (penelitian kepustakaan) dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, majalah-majalah dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Dengan demikian penelitian ini menggunakan penelitian *Deskriptif Analitis*,¹ dengan menganalisis pemikiran Machiavelli yang menyangkut dengan konsep kekuasaan Dan pendekatan ilmu politik (*science of political approach*) dengan cara menganalisa pemikiran Machiavelli terhadap ilmu politik kekuasaan.

b. Sumber Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pembahasan penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*), maka sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer, diantaranya: Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translate in To English By Luigi Ricci, (United State of America, Random House, 1950). Nicolo Machiavelli, *Nicolo Machiavelli, Sang Penguasa: Surat seorang negarawan kepada pemimpin republik*, Terj. C. Woekirsari, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987). J. H. Rapar, *Filsafat politik Machiavelli*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Sebagai sumber data sekunder, diantaranya: J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theori Klasik And Kontemporerly Readings*, Terj. Haris Munandar, *Teori Politik, Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo). Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno*,

¹ Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya dalam masyarakat. Lihat, Faisar Ananda Arfa, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 14-15.

Terj., Ahmad Baidlowi, (Yogyakarta, Pustaka, Pelajar, 2002) A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Kaldun*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992). Maupun karya orang lain sebagai data sekunder. Buku-buku lain yang membahas topik yang sama atau yang berhubungan dengan aspek metodologis juga akan digunakan sebagai bahan banding dan bahan analisis agar bisa mengkaji pemikiran kedua tokoh. Serta membandingkan konsep kekuasaan keduanya.

c. Analisis data

Penganalisaan data dilakukan secara objektif dan diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah konsep yang jelas untuk kemudian disusun menjadi karya tulis melalui metode *diskripsi historis* yang dapat dipahami dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah akademis. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, merupakan metode mempelajari dan menganalisis komunikasi dengan cara yang sistematis, obyektif dan kuantitatif untuk mengukur variabel². Dimaksudkan untuk menganalisis data yang dianggap penting dengan cara menyisihkan masalah-masalah yang tidak relevan dengan penelitian ini, setelah itu baru memberikan pengelompokan berdasarkan masalah yang akan diteliti. Dengan mengkaji pemikiran kekuasaan Machiavelli.

C. Konsep Kekuasaan Machiavelli

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang di inginkan, atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang terjadi pada orang lain menurut keinginan penguasa.³ Pengkajian gagasan kekuasaan Machiavelli setidaknya dikarenakan oleh dua alasan: Pertama, gagasannya telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal gagasan itu dipopulerkan hingga abad XX. Banyak negarawan dan penguasa yang secara sembunyi atau terus terang mengaku telah menjadikan buku Machiavelli sebagai *hand book* mereka dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, misalnya Hitler dan Massolini.

²Fred N. Kerlinger, *Fondation of Behavioral Research*, (New York: Holt Rinerhart and Winston, 1973), h. 525.

³ John R. Schemerhorn, at all. , *Basic Organizational Behavior*, (Osborn, 2nd edition, 1998), h. 195.

Gagasan yang sama telah menjadi basis intelektual, telah menjadi bagi pelaksanaan diplomasi kaum realis. Realisme sebagai satu aliran penting dalam kajian diplomasi internasional, banyak mendasarkan asumsinya pada pemikiran Machiavelli. Kedua, ditinjau dari perspektif sejarah pemikiran politik, gagasannya itu merupakan pemutusan hubungan total masa kini dengan masa lalu, suatu ciri penting abad *Renainsans*.⁴

Pemikiran kekuasaan Machiavelli berbeda dengan pemikiran klasik, zaman Yunani Kuno. Misalkan, Plato menganjurkan sistem pemerintahan yang bersifat patrialistik dimana konsepnya menggambarkan hubungan antara bapak dan anak. Sedangkan Aristoteles menganjurkan hubungan kekuasaan bagaikan suami istri, hal ini berbeda dengan pandangan Machiavelli, menurutnya kekuasaan tidak bersifat abadi atau bersumber pada hubungan kekerabatan. Karena untuk memperoleh kekuasaan dapat digunakan dengan berbagai cara sekalipun bertindak despotik demi kepentingan negara.⁵

Sebagai seorang negarawan Italia, Machiavelli menganjurkan para penguasa untuk mengkombinasikan kelicikan (*cunning*) dengan sikap tidak mengenal belas kasihan dan brutal.⁶ Bagi Machiavelli kekuasaan adalah *raison d'etre* negara dan negara juga merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua (*all embracing*) dan mutlak.⁷ Bertolak dari pandangan-pandangan Machiavelli di atas, sehingga beberapa sarjana berpendapat bahwa Machiavelli mempunyai obsesi terhadap negara kekuasaan (*maachstaat*) di mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum.

Kekuasaan memang sesuatu yang sangat ajaib seseorang yang sedang menggenggam kekuasaan biasanya menjadi tokoh yang disegani, dihormati, ditakuti, dan tidak jarang pula

⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 132.

⁵ Corina Tambunan, *Moralitas dan Kekuasaan : Studi Atas Pemikiran Niccolo Machiavelli*, Tidak diterbitkan, (Pasca Sarjana Departemen Filsafat, FIB UI, Depok, 2007), h. 51-52.

⁶ Inu Kencana Syafe'i, *Filsafat Kehidupan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 132.

⁷ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat...*, h. 133.

dibenci dan dicaci maki. Namun selama kekuasaan itu masih melekat kuat pada diri seseorang, orang tersebut punya kedigdayaan untuk berbuat banyak hal. Ia dapat memaksa orang lain untuk menyatakan ketundukan dan kadang-kadang kepasrahan.⁸

Kebanyakan orang tidak menyukai konsep kekuasaan politik yang berorientasi pada pemukulan, pemaksaan dalam kesetaraan, terkadang kebrutalan. kadang-kadang mendengar hal-hal yang bersifat mengecam "politik kekuasaan" tersirat dalam pernyataan ini adalah gagasan pemerintahan tanpa kekuasaan, dari sebuah gendang kebahagiaan saudara dan saudari mengatur diri atas dasar berbagi cinta. Komunitas yang terbentuk atas basis demikian tidak akan bertahan, namun jika kemudian dilakukan, mereka mengubah diri ke dalam sistem yang diberlakukan oleh pemimpin dan yang dipimpin dengan pola ketaatan yang terlihat mencurigakan seperti kekuatan yang jahat.⁹

Ada beberapa cara berkuasa yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan lima nomor pertama dibawah ini dikemukakan oleh J.R.P. French dan Bertram Raven, sedangkan dua nomor berikutnya adalah gabungan beberapa pakar.

Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat baik yang tradisional maupun yang modern, hanya dibagi sesuai dengan fungsinya kalau tidak dibagi justru timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu secara tirani mampu mempengaruhi semua pihak sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Berikut ada beberapa cara berkuasa yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kekuasaan. Untuk lebih lengkap diuraikan sebagai berikut:

1. *Legitim Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh karena surat keputusan atasan atau pengangkatan masyarakat banyak, yang selanjutnya diterima sebagai pemimpin untuk berkuasa didaerah atau wilayah tersebut.
2. *Coercive Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang atau sekelompok orang yang mempergunakan kekerasan dan kekuatan fisik serta senjatanya untuk memerintah pihak lain.
3. *Expert Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang oleh karena keahliannya berdasarkan ilmu-ilmu yang dimiliki, seni mempengaruhi yang dipunyainya serta budi luhurnya sehingga orang lain membutuhkannya.

⁸ M, Amien Rais, *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), h. 35-36.

⁹ Michael Roskin at all, *Political Science: An Introduction*, Edisi Keenam, (New Jersey, Upper Saddle River, 1997), h. 7.

4. *Reward Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang terlalu banyak memberi barang dan uang kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa berhutang budi atau suatu ketika membutuhkan kembali pemberian yang serupa.
5. *Reverent Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh karena penampilan seseorang, misalnya wajah yang rupawan dan wanita cantik dapat menguasai beberapa pria, ataupun penampilan pangkat dan tanda jabatan seorang pejabat akan menimbulkan kekaguman.
6. *Information Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang yang begitu banyak memiliki keterangan sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, untuk itu yang bersangkutan membatasi keterangannya agar terus menerus dibutuhkan.
7. *Connection Power* yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang memiliki hubungan keterkaitan dengan seseorang yang memang sedang berkuasa, hal ini biasanya disebut dengan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan (*nepotisme*).¹⁰

Menurut Machiavelli jika pada suatu negara yang pemerintahannya berpusat pada birokratis, raja memiliki “lebih banyak kekuasaan” dibandingkan dengan negara feodal yang kekuasaannya tersebar. Didalam negara birokratis secara langsung atau tidak langsung raja mengangkat semua pejabat politik diangkat dari kalangan keluarga *Aristokrat*, sedangkan didalam negara *feodal* yang kekuasaan tersebar, jabatan dan kekuasaan selalu diwariskan. Dengan demikian negara birokratis ditandai dengan terbukanya peluang mobilitas sosial dan politis, dimana orang-orang yang berasal dari tingkatan bawah dapat mencapai kedudukan tinggi, sedangkan negara feodal terdiri dari banyak lapisan sosial dan jarang sekali orang dapat beranjak dari kedudukan yang satu posisi lain. Di dalam negara birokratis selalu terdapat lebih banyak spesialisasi fungsi-fungsi pemerintahan dibandingkan dengan negara feodal. Dengan demikian negara birokratis selalu cenderung mengarah pada pemisahan fungsi dan pemisahan kekuasaan, sedangkan negara feodal cenderung menuju pada penggabungan fungsi dan pembagian kekuasaan.¹¹

The prince dalam sejarahnya telah mengusik bagi setiap penguasa yang ingin menaklukkan atau mereformasi sebuah negara. Meskipun asal usulnya adalah rakyat biasa. Machiavelli merasa ia dapat memberikan sebuah nasehat, bukan karena *study* yang berkepanjangan tentang urusan-urusan *publik*, namun juga karena “orang-orang yang ingin

¹⁰ Inu Kencana Syafe’I, *Filsafat Politik* (Bandung, bandar Maju, 2005), h. 215-216.

¹¹ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Masa*, terjeh. Sahat Simamora dan Suryatim, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 173-174.

penguasa perlu memahami karakter rakyat secara tepat, dan untuk menjadi pemuka rakyat harus memahami karakter seorang pemimpin secara tepat” dari titik pijakan secara *realistis*, bukannya yang didasarkan pada konsepsi-konsepsi politik *utopia*, Machiavelli menguji watak-watak para penguasa dipuja atau dihujat. Ia berpendapat bahwa penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti.
- b. Watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin dan kontrol diri.
- c. Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus.

Pangeran dibolehkan untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela, karena rakyat hanya peduli dengan hasilnya, yaitu dengan kebaikan negara. Tentu saja seorang penguasa tercelapun tetap harus berurusan dengan sifat perubahan keadaan yang mendadak dan tak terpikirkan, ketidakpastian nasib baik.¹²

Kesarjanaan modern berpendapat bahwa minat dan tujuan pokok Machiavelli ialah untuk kebaikan rakyat Italia. Tidak ada alasan atau keharusan menolak penilaian ini. Tuduhan *klasik* terhadap pemikir florentina ini tidak di arahkan pada tujuan Machiavelli tetapi pada kerangka kerja yang teoritis yang di bangunnya serta kelemahan logikanya. Machiavelli mengikuti tradisi kuno dalam membedakan antara kerajaan dan tirani, yang pertama merupakan penjelmaan kekuasaan bagi kebaikan umum rakyat, yang kedua adalah kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi penguasa. Penguasa yang baik adalah orang “yang tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kebaikan umum, dan bukan demi kepentingan pengganti-penggantinya, tetapi untuk tanah air yang menjadi milik semua orang.”¹³

Machiavelli adalah filsuf kekuasaan yang brilian untuk segala jaman. Menurutnya, kekejaman asal dipakai secara tepat, merupakan sarana stabilisasi yang diperlukan bagi kekuasaan. Bahwa lebih baik kalau penguasa ditakuti daripada kalau ia dicintai. Ketakutan bisa mempertahankan

¹² Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theori Klasik And Kontemporary Readings*, Terj. Haris Munandar, *Teori Politik, Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo), h. 20.

¹³ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno*, Terj., Ahmad Baidlowi, (Yogyakarta, Pustaka, Pelajar, 2002), h. 256-257.

persatuan, kemegahan dan martabat penguasa. Manajemen rasa takut ini yang harus di laksanakan melalui suatu sentral kekuasaan yang membuat tunduk, patuh dan ketidakberdayaan menjadi landasan untuk tegaknya negara. Negara yang kuat adalah negara yang ditakuti. Kekuasaan menurut versinya, tidak perlu mewakili mayoritas, namun ia bisa menundukkan mayoritas untuk menyetujui apa yang menurut penguasa adalah yang paling baik bagi negara.

D. Negara dan Kekuasaan

Negara tanpa kekuasaan merupakan sesuatu yang tak masuk akal. negara membutuhkan kekuasaan sebagai alat untuk meraih tujuan negara. Karena kekuasaan itu begitu penting bagi negara, bahkan sesungguhnya tak terpisahkan dari negara serta merupakan hakikat dari negara itu sendiri, maka beberapa pemikir politik berpendapat bahwa negara adalah penjelmaan dari kekuasaan. Oleh sebab itu Machiavelli mengungkapkan seyogianya negara itu adalah negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, kedaulatan berada pada negara itu sendiri. Hanya dengan menjadi negara kekuasaan. Barulah negara itu memiliki kekuasaan pemaksa yang digunakan untuk melindungi, menjaga, dan mempetahankan eksistensi negara itu.¹⁴

Dalam pandangan Bertrand Russell, kekuasaan adalah suatu pola tindakan yang menginginkan hasil dari tindakan tersebut. Seorang yang memiliki kekuasaan mengharapkan menerima kekuasaan tersebut dari orang lain, sehingga pemilik kekuasaan memiliki pengakuan/ legitimasi untuk melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan legitimasi tersebut.¹⁵

Menurut Soehino bentuk-bentuk negara dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Bentuk Republik

¹⁴ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 57.

¹⁵ Bertrand Russell, *Power: A New Social Analysis*, (London, Routledge, 1960). h. 25.

Republik adalah “RE” artinya kembali “Publik” artinya masyarakat. Republik artinya negara yang segala urusan pemerintahannya ditentukan oleh kehendak rakyatnya.

b. Kerajaan Absolut (Monarkhi Absolut)

Bentuk negara kerajaan Absolut adalah dimana pemerintah negara di pimpin oleh seorang raja yang merupakan Tuhan. Raja ini berkuasa secara mutlak (konsep ini di tolak Natsir).

c. Kerajaan Konstitusional

Bentuk negara kerajaan konstitusional adalah negara yang di perintahkan oleh seorang raja tetapi terikat dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini raja tidak dapat berkuasa secara mutlak.

d. Negara Federasi (Negara Serikat)

Negara Federasi ini adalah gabungan dari beberapa negara bagian yang bersepakat menghimpun diri dalam suatu ikatan (union) dengan hak otonomi yang seluas-luasnya dijalankan oleh negara-negara bagian. Sedangkan pemerintah pusat hanya mengurus masalah pertahanan keamanan, moneter dan hubungan luar negeri saja.¹⁶

Kekuasaan menurut Machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Dalam pemikiran Machiavelli kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan.¹⁷

Machiavelli menguraikan bahwa dalam bertindak tidak harus terfokus pada apa yang seharusnya dilakukan, namun apa yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi. Seorang penguasa

¹⁶ Suhino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta, Liberti, 1995), h. 58.

¹⁷ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli...*, h. 430.

harus mengetahui wilayah dari tindakannya dan apa yang wajar dilakukan. Untuk melakukan sesuatu, seorang penguasa harus mengetahui medan yang dihadapi. Dengan demikian, ia tidak akan buta. Tentu, memiliki tujuan untuk meraih sukses adalah yang utama.¹⁸

Ia pun memberi gambaran mengenai relasi antara penguasa dan rakyat haruslah hidup berdampingan dengan rukun. Menurutnya suasana seperti itu hanya bisa terbangun dalam suasana politik yang stabil di mana di satu sisi terdapat penguasa yang kuat dan di sisi lain terdapat rakyat yang kuat pula. Adapun Machiaveli membenarkan untuk mencapai tujuan kekuasaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan *despotik*. Namun pada sisi lainnya menurutnya rakyatpun harus kuat, dengan cara, rakyat harus dipersenjatai diri dengan pengetahuan agar rakyat tidak di perdayai oleh penguasa.¹⁹

Secara umum machiavelli mendukung kekuasaan yang menerapkan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Penguasa berhak melanggar hak-hak rakyatnya bilamana dianggap menghalangi tujuan dan cita-cita penguasa. Asumsi ini diuraikan Russell sebagai berikut: Machiavilli berpendapat bahwa manusia beradab hampir pasti akan menyeimbangi egositas yang tidak bermoral. Jika seseorang menginginkan untuk mendirikan Negara Republik, Machiavelli mengungkapkan, ia akan merasa lebih mudah untuk meraihnya, dibandingkan dengan seseorang dari kota besar, karena yang kondisinya sudah rusak. Jika seorang egois yang tidak bermoral, dia akan bijak dalam bertindak serta tetap menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi.²⁰

Pada masa Machiavelli, tampak bahwa negara sedang tidak setabil dan sulit di pulihkan hanya mengandalkan hukum. Karena hukum akan berjalan bilamana kondisi negara stabil.

¹⁸ Thompson Dannis, *Pemikiran-Pemikiran Politik*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986. h. 37.

¹⁹ *Ibid.*, h. 40.

²⁰ Bertrand Russell, *Power: A New Social Analysis...*, h. 497.

Sedangkan disisi lain tanpa adanya hukum menjadikan kehidupan menjadi tidak menentu. Sehingga Machiaveli menyarankan untuk itu diperlukan intervensi kekuatan penguasa.

Machiavelli menegaskan, untuk mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa diperbolehkan berbohong, menipu dan menindas. Pandangan ini bukan sebagai nasehat politik, melainkan Machiavelli memandang kekuasaan memang tak sempurna dunia surgawi. sebagaimana situasi pada zaman pertengahan dan pra renaissance. Dalam pandangannya, kekuasaan adalah dunia yang penuh intrik, kekejian dan ketololan.²¹

E. Penguasa Negara Dan Kekuasaan

Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* menjelaskan, adanya penguasa menandakan ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain yang ada di muka bumi. Setiap manusia pasti memerlukan penguasa, karena dalam diri manusia itu masih tersisa sifat-sifat kebinatangan, dan kecenderungan untuk mendalimi orang lain. Seandainya penguasa tidak ada, maka kehidupan manusia akan berada dalam keadaan kacau dan penuh dengan situasi anarki yang akhirnya akan berakibat pada eksistensi manusia di muka bumi ini. Bagi Ibnu Khaldun, penguasa bukanlah orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Akan tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting dengan tujuan berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.

Dengan tegas ia mengatakan bahwa kekuasaan adalah "hubungan". Ia berkata: ketahuilah bahwa kepentingan rakyat pada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti keelokan bentuk badannya, kecantikan mukanya, kebesaran tubuhnya, luas ilmu pengetahuannya, indah tulisannya, atau ketajaman otaknya. Kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan antara dia dan mereka. Karena itu kekuasaan dan penguasa termasuk hal yang bersifat rasional. Jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Dia dinamakan sebagai penguasa karena ia mengurus urusan rakyat, sedangkan rakyat adalah mereka yang memiliki penguasa.²²

²¹ Niccolo Machiavelli, *The Discourses*, Translate in To English By Luigi Ricci, (United State of America, Random House, 1950), h. 115.

²² Ibnu Khaldun, *Muqaddimat Ibnu Khaldun*, (Khairo: Lajnah al-Bayan al-Araby, 1958), h. 382-383.

Dari penjelasan di atas Ibnu Khaldun berpendapat bahwa, tidak terdapat suatu keistimewaan pada penguasa kecuali ia dipercaya masyarakat untuk mengurus mereka. Baik uruknya seorang penguasa sangat tergantung pada bagaimana caranya ia mengurus kepentingan rakyat, apabila kekuasaannya dilaksanakan dengan lemah lembut, tegas dan adil, maka semua pihak, termasuk penguasa dan rakyat akan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sedangkan apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan keras, penuh hukuman dan penindasan, serta selalu mencari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan rakyat, maka rakyat akan diselimuti rasa takut dan merasa tertindas. dalam ungkapan pendeknya Ibnu Khaldun berucap *al-ma'Imudu huwa at-tawassut*. (sifat yang terpuji adalah pertengahan).

Dengan demikian seorang penguasa yang baik adalah penguasa yang berada di tengah-tengah rakyat, serta berlaku baik dan lemah lembut terhadap mereka. Karena itu pula penguasa akan terlindungi dari segala pihak, dan rakyat akan menyayanginya serta akan mempertahankannya sampai tetesan darah terakhir. Dalam melaksanakan tugasnya penguasa hendaklah memiliki perangkat fasilitas yaitu: dominasi, pemerintahan dan kekuasaan, kesemua ini digunakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan dan kesewenangan dalam masyarakat.

Semua negara atau kerajaan yang dikenal dalam sejarah diatur menurut salah satu dari dua cara, yaitu diatur oleh seorang penguasa yang ditaati oleh semua penduduk dan para mentrinya, dengan direstui dan atas persetujuannya, membantu memerintah, atau diatur oleh seorang raja dan para bangsawan yang tinggi rendah kedudukan mereka tidak ditentukan oleh persetujuan penguasa, tetapi dari garis keturunan mereka yang sudah lama ada. Para bangsawan tersebut memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat sendiri, yang mengakui mereka sebagai penguasa mereka dan mencintainya mereka. Di dalam negara yang diperintah oleh seorang penguasa beserta para pembantunya, penguasa mempunyai wewenang yang lebih besar. Karena di seluruh negaranya hanya dialah yang diakui dan berhak mengadakan persekutuan. Yang lain-lain seperti menteri dan pejabat pemerintah dihormati, namun tidak menerima tanda kecintaan khusus dari rakyat.²³

Sesuai dengan jenis negara kerajaan, maka ada dua jenis penguasa, yaitu: penguasa lama dan penguasa baru. Penguasa lama adalah penguasa didalam negara kerajaan warisan. Penguasa dalam kerajaan warisan itu menurut Machiavelli, akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang

²³ Niccolo Machiavelli, *The Prince*., h. 15.

relatif kecil dan dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan oleh karena rakyat telah terbiasa dengan cara-cara yang sudah ditempuh oleh para pendahulunya. Yang penting sang penguasa tetapa menempuh cara-cara itu dengan melakukan penyesuain-penyesuaian yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi.²⁴

Semua negara dan kekuasaan yang memegang atau memiliki kekuasaan atas umat manusia baik republik atau monarki atau turun-temurun baik di mana penguasa telah berkuasa selama bertahun-tahun secara turun temurun, atau mereka adalah kerajaan terbaru. Kerajaan baru itu sendiri dapat berbentuk kerajaan yang baru sama sekali, seperti Milan untuk Francesco Sforza, atau dapat berupa negara bagian yang digabungkan pada kerajaan warisan seorang raja yang telah memperoleh kekuasaan atas negara-negara bagian tersebut, seperti umpamanya Kerajaan Napels dalam hubungannya dengan raja Spanyol. sehingga diperoleh wilayah kekuasaan baik telah menyatakan bebas, dan mereka dahulunya merdeka baik oleh kekuatan senjata dari pangeran sendiri, atau orang lain, atau jatuh ke dia dengan nasib baik atau kemampuan khusus karena petualangan yang penuh dengan keberanian.²⁵

Bagi Machiavelli ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi penguasa, Machiavelli mengutarakan ada dua cara untuk menjadi penguasa, yang tidak ada kaitannya dengan keberuntungan atau kemampuan, mereka tidak harus melewatinya begitu saja, meskipun salah satu dari mereka bisa lebih lengkap dibahas panjang lebar dalam pembahasan Negara Republik. Dalam hal ini, ketika seseorang menjadi penguasa melalui dua cara jahat atau keji, atau ketika seorang warga sipil menjadi penguasa di negaranya melalui dukungan dari masyarakat. Untuk menjelaskan cara yang pertama, Machiavelli mengemukakan dua contoh, satu zaman kuno, dan lainnya dari zaman modern, tanpa menjelaskan lebih jauh akan manfaat dari tata cara tersebut, karena Machiavelli menilai akan contoh-contoh tersebut cukup jelas bagi siapapun yang akan meniru cara-cara mereka (penguasa).²⁶

Machiavelli menekankan bahwa penguasa itu harus menempuh untuk melakukan penyesuai-penyesuaian yang akan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi, hal ini diungkapkan oleh Machiavelli sebagai berikut:

“Kesulitan untuk memelihara negara-negara warisan yang telah diperintah oleh suatu keluarga raja turun temurun jauh lebih kurang daripada kesulitan-kesulitan didalam

²⁴ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli*, h. 65.

²⁵ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translate in To English By Luigi Ricci, (United State of America, Random House, 1950), h. 5.

²⁶ Niccolo Machiavelli, *The Prince..*, h. 31.

kerajaan-kerajaan yang baru, karena cukuplah jika tidak menyimpang dari warisan kebiasaan, dan menyesuaikan diri terhadap keadaan-keadaan yang tak terduga sebelumnya.

Karena kesulitan-kesulitan yang relative kecil dan dalam jumlah yang tidak begitu banyak yang dihadapi oleh para penguasa di dalam negara kerajaan warisan, maka kualitas sang penguasapun tak perlu terlalu istimewa. Dengan kemampuan yang biasa-biasa saja, ia sudah dapat mempertahankan negara, terkecuali ia diserbu oleh suatu negara yang memiliki angkatan perang yang sangat kuat. Dan apabila ia ditaklukkan, pada waktu yang tidak terlalu lama ia akan sanggup merebut kembali kekuasaannya. Seorang penguasa dengan kemampuan biasa akan senantiasa dapat menjaga negaranya terkecuali ia disingkirkan dari kekuasaannya oleh suatu kekuasaan yang luar biasa hebatnya, dan ia pun akan sanggup merbutnya kembali disaat penakluknya menghadapi kesulitan.

Sebaliknya penguasa daerah baru yang merupakan kerajaan gabungan, akan menghadapi bnyak kesulitan dan kesukaran yang besar. Hal itu biasanya disebabkan oleh karena harapan-harapan rakyat pada penguasa baru itu tak terpenuhi. Mereka merasa tertipu, karena mereka telah memberontak dan ikut menggulingkan penguasa yang lama demi keinginan untuk hidup lebih baik, tetapi kenyataannya tak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Mereka kecewa lalu menimbulkan berbagai kesulitan yang serius bagi penguasa baru, mengenai hal ini Machiavelli mengatakan:

“Justru didalam monarki baru, kesulitan-kesulitan benar-benar ada. Pertama-tama, jika negara itu tidak sama sekali baru, maka pada mulanya kekacauan timbul dari kesalahan alami yang memang muncul diseluruh wilayah kekuasaan baru, karena manusia sudi mengganti para penguasa mereka, dengan harapan agar kehidupan mereka akan lebih baik, dan keyakinan ini membuat mereka mengangkat senjata melawan para penguasa mereka, padahal mereka tertipu sebagaimana yang dibuktikan oleh pengalaman kemudian, bahwa mereka beralih dari keadaan yang buruk ke keadaan yang paling buruk.

Lebih parah lagi keadaannya, apabila penguasa baru itu menguasai wilayah-wilayah yang memiliki bahasa, hokum, dan tradisi yang berbeda-beda. Kerusuhan akan lebih mudah timbul karena emosi rakyat gampang tersulut. Perbedaan bahasa, hokum dan tradisi merupakan hal yang amat rawan yang harus diwaspadai oleh penguasa-penguasa baru. Untuk mempertahankan wilayah-wilayah serupa itu, selain mengandalkan nasib baik, dibutuhkan pula upaya yang sungguh-sungguh.

Dalam hal ini Macjiavelli mengungkapkan, jika wilayah kekuasaan melingkupi suatu propinsi yang berbeda bahasa, undang-undang, dan adat istiadatnya, kesulitan-kesulitan yang harus diatasi sangat besar, dan untuk mempertahankan wilayah itu dibutuhkan nasib baik, sebagaimana pula dibutuhkan usaha yang sekuat-kuatnya.

Betapa riskannya menjadi penguasa di negara baru, khususnya negara yang merupakan negara-negara campuran (*Mixed Monarchies*). Terlampau banyak kesulitan-kesulitan besar yang muncul serta kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan penguasa yang memiliki kualitas yang benar-benar istimewa”.²⁷

Seorang rakyat biasa yang akan menjadi penguasa dengan tidak melalui kejahatan atau kekerasan, tetapi dengan dukungan sesama warga negara, yang dapat disebut kekuasaan

²⁷ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli...*, h. 66-68.

konstitusional. untuk mencapai posisi ini orang tidak tergantung sepenuhnya pada keberuntungan yang layak atau sepenuhnya pada nasib mujur, tetapi lebih tergantung pada kecerdikan dalam mengendalikan langkah serta didukung akan keberuntungan seseorang. Kedudukan ini dapat dicapai karena dukungan rakyat karena dukungan golongan bangsawan. Dua kelas masyarakat yang berbeda ini selalu ada di setiap kota. Dan rakyat dimanapun juga berharap dengan rasa cemas agar tidak diperintah atau ditindas oleh para bangsawan, sedangkan para bangsawan siap untuk memerintah dan menindas rakyat. Ambisi-ambisi yang saling berlawanan ini, menghasilkan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu: kerajaan, kota yang merdeka, atau anarki.

Suatu kerajaan diciptakan oleh rakyat atau oleh para bangsawan, tergantung pada siapa dari kedua pihak tersebut menggunakan peluang yang ada. Yang biasa terjadi bila para bangsawan mengetahui bahwa mereka tidak dapat melawan rakyat, mereka mulai bersatu dan mengangkat salah seorang diantara mereka dan enjadikannya penguasa, agar mereka dapat mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, karena di bawah wewenangnya. Rakyat dengan cara yang sama, kalau tidak mampu melawan para bangsawan, mengangkat pula salah seorang diantara mereka dan menjadikannya penguasa agar mereka dilindungi oleh kekuasaan tersebut.

Orang yang menjadi penguasa karena dukungan para bangsawan akan menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada orang yang diangkat menjadi penguasa dari dukungan rakyat, karena ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang merasa sama derajatnya, karena itu penguasa tersebut tidak akan memerintah atau mengatur seenaknya. Orang yang menjadi penguasa karena dukungan rakyat berkuasa sendiri, tidak ada seorangpun atau sedikit sekali yang melawannya.

Dengan demikian tidak mungkin membuat para bangsawan merasa puas dengan tindakan yang jujur, tanpa merugikan kepentingan pihak lain. Tetapi hal ini dapat dilakukan sejauh menyangkut rakyat. Rakyat lebih jujur dalam cita-cita mereka daripada para bangsawan, karena para bangsawan ingin menindas rakyat, sedangkan rakyat sangat menginginkan untuk menghindari penindasan. Penguasa tidak akan pernah dapat menjamin keselamatannya sendiri jika berhadapan dengan rakyat yang bersikap bermusuhan dikarenakan jumlah mereka besar sekali. Tetapi rakyat dapat melawan sikap bermusuhan para bangsawan, karena jumlah mereka hanyalah sedikit.

Hal yang paling buruk yang dapat dialami oleh penguasa dari rakyat yang memusuhi rakyat, ia akan ditinggalkan oleh rakyat, sedangkan menghadapi bangsawan yang memusuhinya, ia terpaksa takut dan tidak hanya ditinggalkan begitu saja tetapi mereka secara

aktif menentanginya. Karena mereka lebih jauh dalam hal pandangan dan kelicikan, mereka selalu dengan cepat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri dan melindungi kepentingan mereka, serta memihak pada orang yang mereka harapkan akan menang.²⁸

Orang yang menjadi penguasa atas dukungan rakyat bagaimanapun juga harus tetap mempertahankan persahabatan, hal ini akan mudah dilakukannya karena rakyat tidak menuntut apapun agar mereka tidak mengalami penindasan. Tetapi jika orang yang menjadi penguasa bertentangan dengan keinginan rakyat dan karena mendapat dukungan para bangsawan, ia harus berusaha mengambil hati rakyat, ini akan mudah dilakukannya jika penguasa melindungi rakyat. Sebagaimana orang yang menerima kebaikan dari orang yang mereka anggap jahat akan merasa lebih besar rasa terima mereka kepada pemberi, dengan demikian rakyat akan cepat bersikap baik terhadap penguasa. Penguasa dapat mengambil hati rakyat dengan banyak cara, yang berbeda-beda menurut keadaan.

Machiavelli mengemukakan bahwa penting bagi seorang penguasa memelihara persahabatan dengan rakyat, kalau tidak ia tidak akan pernah mempunyai teman yang akan dapat memberi bantuan jika negara dalam keadaan bahaya.²⁹

Tentu saja hal itu akan terjadi apabila benar-benar memperoleh dukungan dari rakyatnya. Oleh sebab itu ia harus selalu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh dukungan rakyat dan agar dicintai rakyat, hal itupun sebenarnya tidak begitu sulit baginya, asalkan saja raja yang sah tidak menyakiti hati rakyatnya, maka sudah sewajarnya apabila ia semakin dicintai, dan jika tiada kejahatan yang luar biasa yang membuat ia dibenci, maka sudah sepantasnya apabila rakyat terpaut kepadanya.³⁰

Penguasa di negara baru haruslah penguasa yang sungguh-sungguh sanggup berupaya sekuat mungkin untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Penguasa di negara baru perlu menyadari bahwa ia tidak mudah memperoleh dukungan rakyat, berbeda dengan penguasa di negara warisan yang mana asalkan saja ia sanggup memelihara cara dan kebiasaan leluhurnya yang memang telah memperoleh simpati rakyat. Ia bukan hanya memperoleh dukungan rakyat, melainkan juga dicintai dan dengan demikian kekuasaannya pun terjamin

²⁸ *Ibid.*, h. 35-37.

²⁹ Nicolo Machiavelli, *Sang Penguasa: Surat seorang negarawan kepada pemimpin republik*, Terj. C. Woekirsari, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), h. 41-42.

³⁰ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli...*, h. 67.

Dengan demikian jelas terlihat perbedaan kualitas penguasa yang dibutuhkan di Negara-negara warisan (*Hereditary State*), dan kualitas penguasa yang dibutuhkan di Negara-negara campuran atau gabungan. Perbedaan kualitas itu ditentukan oleh banyak sedikitnya dan besar kecilnya kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi.³¹

Machiavelli sering disalah pahami, seakan-akan ia seorang pemikir yang sinis, yang hanya berkepentingan untuk mengabadikan kekuasaan para pemimpin. Sebenarnya Machiavelli mengangumi *Republik* Roma Kuno yang keras dan tinggi dalam tuntutan *etika politik*. Ia menderita karena ketidakberdayaan politik Italia yang untuk sebagiannya di kuasai oleh Jerman, Perancis, dan Spanyol, dan untuk sebagiannya lagi terpecah belah kedalam negara-negara kota. Ia merindukan suatu negara yang sehat, kuat, dan tidak korup. Ia mengharapkan semangat tak mau kalah dan menuntut kesigapan militer para warga negara.

Kesimpulan

Machiavelli melihat kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Apabila ada yang mengatakan bahwa dengan mendapat kekuasaan maka itu akan memudahkan untuk meraih poin-poin lain, seperti kesejahteraan rakyat, penyebaran agama yang luas, ataupun pendidikan moral yang terarah, itu tidaklah benar. Hal yang terjadi adalah sebaliknya. Baik itu moral ataupun agama adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk dapat menggapai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah cara untuk meraih hal-hal lain, tapi kekuasaan merupakan inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa atau yang ingin berkuasa

Dalam bukunya *The Prince* (Sang Penguasa), Niccolo Machiavelli memberikan petunjuk bahwa untuk menjadi seorang penguasa boleh melakukan segala cara. Ia juga memberikan nasihat bagaimana menjadi seorang penguasa yang dapat mempertahankan kelanggengan kekuasaannya dengan mengabaikan penilaian moralitas dan agama. Machiavelli memisahkan antara kekuasaan negara dengan kehidupan beragama dan kepentingan moral. Ia hanya membahas bagaimana mencapai tujuan yaitu kekuasaan apapun caranya.

Pemikiran Machiavelli yang diutarakan dalam bukunya tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat luas, terutama yang menyangkut hubungan antara kekuasaan dengan penguasa, moral dan agama. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa Machiavelli

³¹ *Ibid.*, h. 69.

sebagai guru yang jahat (*teacher of evil*) yang telah keluar dari moral dan ajaran agama, sehingga tak heran jika ia disebut guru yang jahat. Akan tetapi sebagian lainnya mengatakan bahwa ia tak sejahat itu. Beberapa bukti terhadap anggapan bahwa Machiavelli adalah orang yang kejam, sadis dan tidak bermoral.

Daftar Pustaka

Faisar Ananda Arfa, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, 2010, Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Thomson Dannis, *Pemikiran-Pemikiran Politik*, 1986, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Samuel Huntigton P, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Masa*, terjeh. Sahat Simamora dan Suryatim, 2003, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fred N Kerlinger, *Fondation of Behavioral Research*, 1978, New York: Holt Rinerhart and Winston.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimat Ibnu Khaldun*, 1958, Khairo: Lajnah al-Bayan al-Araby.

Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theori Klasik And Kontemporary Readings*, Terj. Haris Munandar, *Teori Politik, Kajian Klasik dan Kontemporer*, 2005, Jakarta: Raja Grafindo.

Niccolo Machiavelli, *The Prince: Translate in To English By Luigi Ricci*, 1950, United State of America: Random House.

Niccolo Machiavelli, *The Disccurses: Translate in To English By Luigi Ricci*, 1950, United State of America: Random House.

Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa: Surat seorang negarawan kepada pemimpin republik*, Terj. C. Woekirsari, 1987, Jakarta: PT. Gramedia.

J. H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli*, 1991, Jakarta: Rajawali Pers.

Michael Rosikin, at all, 1997, *Political Science: An Introduction*, Edisi Keenam, (New Jersey, Upper Saddle River.

Bertrand Russell, *Power: A New Social Analysis*, 1960, London: Routledge.

Jhon R. Schemerhorn, at all. *Basic Organizational Behavior*, 1998, Osborn, 2nd edition.

Henry Schmandt, *J Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno*, Terj., Ahmad Baidlowi, 2002, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 2002 Jakarta: Raja Grafindo.

Suhino, *Ilmu Negara*, 1995, Yogyakarta: Liberty.

Inu Kencana Syafe'i, *Filsafat Kehidupan*, 1995, Jakarta: Bumi Aksara.

M. Amien Rais, *Sukses dan Keajaiban Kekuasaan*, 1997, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafe'i, *Inu Kencana Filsafat Politik*, 2005, Bandung: bandar Maju.

Corino Tambunan, Corina, *Moralitas dan Kekuasaan: Studi Atas Pemikiran Niccolo Machiavelli* 2007 Pasca Sarjana Departemen Filsafat, FIB UI, Depok.